



## **Kuasa Simbolik Tokoh Blater Dalam Kontestasi Politik Lokal Di Madura: Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Pilkada Bangkalan 2024**

*Moh Nurul Jadid<sup>1</sup>, Jupriono<sup>2</sup>, Dey Prayogo<sup>3</sup>*

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v4i2.187>

### **CORRESPONDENCE**

E-mail: [njadid99@gmail.com](mailto:njadid99@gmail.com)

### **KEYWORDS**

Symbolic power, blater, political communication, regional election, Madura

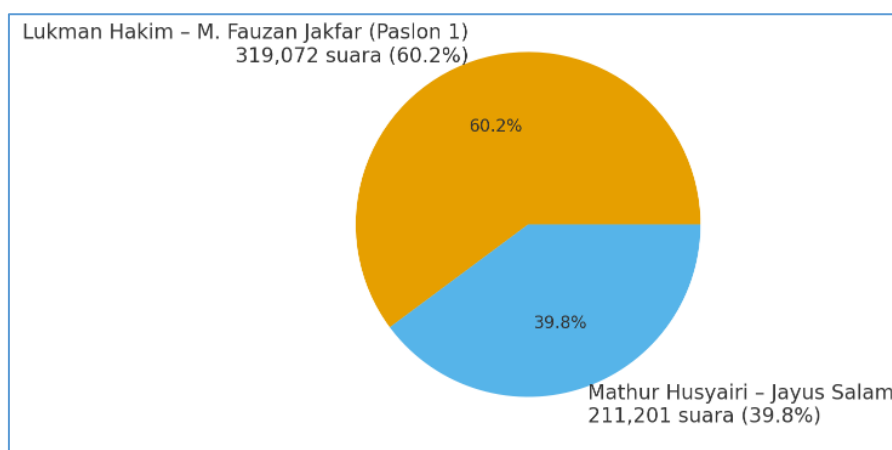
### **ABSTRACT**

This research analyzes the symbolic power of blater figures in political communication strategies during the 2024 Bangkalan Regional Head Election, particularly examining how informal actors mobilize electoral support despite minimal institutional backing. This qualitative case study employed in-depth interviews with four key informants (blater figures, village heads, political observers, and community members) alongside participatory observation of informal social spaces. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model with triangulation for validity. Blater's symbolic power is constructed through the accumulation of social capital (extensive cross-class networks), cultural capital (mastery of *ajhâgâ* and *tengka* values), and economic capital (selfless generosity), which are converted into symbolic capital. Their political communication operates implicitly through informal spaces (*sandur*, *to'otok*) with simple messages like "*tang orang*" that are effective due to long-term moral legitimacy. Candidate pair number 2, supported by only three non-parliamentary parties, obtained 39.8% of votes, approaching the 60.2% of pair number 1 supported by 12 major parties. limitations/implications: This study is limited to Bangkalan District, which may affect generalizability. Future research could examine comparative dynamics in other Madurese or Indonesian regions with similar honor cultures. Political parties should engage informal community leaders to enhance trust and voter mobilization. Campaign strategies should integrate local values rather than relying solely on formal institutional structures. This research contributes to Bourdieu's symbolic power theory by demonstrating its application in non-Western honor cultures, revealing that moral legitimacy can be more efficient than formal party structures in electoral mobilization.

## PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diterapkan sejak 2015 merupakan instrumen konsolidasi demokrasi di Indonesia yang bertujuan menciptakan efisiensi dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, kontestasi politik di tingkat lokal sering dipengaruhi faktor non-institusional seperti hubungan patron-klien, ikatan kekerabatan, dan dominasi elite informal (Aspinall & Berenschot, 2019). Di Madura, struktur politik lokal tidak dapat dilepaskan dari peran dua kekuatan utama: kiai sebagai otoritas religius dan blater sebagai figur penjaga keamanan dan mediator sosial (Hidayaturrahman et al., 2023).

Pilkada Bangkalan 2024 menghadirkan fenomena elektoral yang menarik untuk dikaji. Pasangan calon nomor urut 1 didukung mayoritas partai besar (PKB, Gerindra, PDI-P, Hanura, Perindo, Nasdem, PSI, PKS, Golkar, Demokrat, Buruh, dan PAN), sementara pasangan nomor urut 2 hanya didukung partai non-parlemen (PBB, PPP, dan Gelora). Hasil resmi KPU Kabupaten Bangkalan (2024) menunjukkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 319.072 suara (60,2%), sedangkan pasangan nomor urut 2 meraih 211.201 suara (39,8%) dari total 530.273 suara sah, dengan tingkat partisipasi mencapai 71,3% dari 765.222 pemilih terdaftar.



**Gambar 1 Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pilkada Bangkalan 2024**

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, 2024. Data diolah oleh peneliti, 2025.

Gambar 1 menunjukkan bahwa meskipun pasangan nomor urut 1 unggul secara signifikan dengan 60,2% suara, perolehan 39,8% oleh pasangan nomor urut 2 yang hanya didukung tiga partai non-parlemen mengindikasikan adanya kekuatan mobilisasi politik non-institusional yang efektif. Gap 20,4% antara kedua pasangan relatif kecil mengingat disparitas dukungan partai yang sangat besar (12 partai berbanding 3 partai non-parlemen). Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik lokal Bangkalan, legitimasi informal tokoh blater dapat menyaingi kekuatan mesin partai formal.

Yang menarik bukanlah kemenangan pasangan pertama, melainkan perolehan suara signifikan hampir 40% oleh pasangan kedua yang hanya memiliki dukungan institusional minimal. Fenomena ini mengindikasikan adanya kekuatan politik non-institusional yang bekerja di luar struktur formal kepartaian, khususnya peran tokoh blater yang memiliki

legitimasi kultural kuat di masyarakat. Blater sering digambarkan ambivalen: di satu sisi distigmatisasi sebagai aktor kekerasan, tetapi di sisi lain dianggap penjaga keamanan dan penengah konflik (Kusumo, 2018; Azhar & Surokim, 2018).

Penelitian terdahulu tentang blater lebih banyak berfokus pada peran mereka dalam Pilkades dan relasi patron-klien di tingkat desa (Baihaki, 2023; Hidayaturrahman et al., 2023; Muhammad, 2023). Studi Hidayaturrahman et al. (2023) menemukan bahwa blater berperan sentral dalam pemilihan kepala desa melalui pengendalian opini publik, intimidasi, dan politik uang. Namun, penelitian tersebut belum menjelaskan mekanisme komunikasi politik yang digunakan blater dalam skala yang lebih luas seperti Pilkada kabupaten, serta belum mengeksplorasi kemungkinan bahwa tidak semua blater beroperasi dengan cara manipulatif.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis kuasa simbolik tokoh blater dalam konteks Pilkada Bangkalan 2024 menggunakan kerangka teori Pierre Bourdieu. Bourdieu (1991) mendefinisikan kuasa simbolik sebagai kekuasaan untuk mengkonstruksi realitas melalui pernyataan, membuat orang melihat dan mempercayai, serta mengonfirmasi atau mentransformasi cara pandang terhadap dunia. Kuasa simbolik bekerja melalui akumulasi dan konversi modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi menjadi modal simbolik berupa kehormatan, prestise, dan otoritas yang diakui secara sosial (Bourdieu, 1986).

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana kuasa simbolik tokoh blater dimaknai, dikonstruksi, dan digunakan dalam strategi komunikasi politik pada Pilkada Bangkalan 2024, serta bagaimana proses tersebut memengaruhi mobilisasi dukungan dan pilihan politik masyarakat? Penelitian ini penting tidak hanya untuk memperkaya kajian komunikasi politik di Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan aktor lokal dalam memahami dinamika komunikasi politik informal yang berpengaruh kuat di tingkat akar rumput.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus intepretatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam Pilkada Bangkalan 2024, khususnya mengenai peran dan kuasa simbolik tokoh blater dalam strategi komunikasi politik. Pendekatan kualitatif dipilih agar dapat menangkap dan mengeksplorasi makna di balik interaksi sosial, persepsi, dan pengalaman dari para informan yang terlibat dalam proses tersebut.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci yang dipilih secara purposif untuk mendapatkan informasi yang kaya dan relevan. Informan tersebut terdiri dari satu tokoh blater yang aktif dalam mobilisasi suara, satu kepala desa yang memiliki pengaruh lokal, satu tokoh masyarakat yang dikenal luas dalam komunitas, dan satu pengamat politik yang memahami dinamika politik di Bangkalan. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu agar dapat mewakili berbagai perspektif yang ada dalam masyarakat terkait dengan topik penelitian.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis ini meliputi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap awal, data dikumpulkan melalui wawancara bersama informan, di mana hasil wawancara direkam dan ditranskrip untuk memastikan akurasi informasi. Selanjutnya, reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang tidak relevan dan menekankan pada tema-tema utama yang muncul dari wawancara.

Display data dilakukan dengan penyajian informasi dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi yang mempermudah pemahaman terhadap temuan-temuan yang ada. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan hasil analisis dan menghubungkannya dengan tujuan penelitian, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran tokoh blater dalam konteks politik lokal. Untuk menjaga kevalidan data, digunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi informasi dari berbagai informan, agar mendapatkan pandangan yang holistik terhadap fenomena yang diteliti. Sementara itu, triangulasi metode melibatkan penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda, seperti observasi lapangan, untuk mendukung hasil wawancara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang valid, reliabel, dan representatif mengenai kuasa simbolik tokoh blater dalam Pilkada Bangkalan 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa kuasa simbolik tokoh blater terbentuk melalui akumulasi modal sosial, budaya, dan ekonomi, yang dipandu oleh prinsip moral dan kehormatan. Dalam masyarakat Madura, konsep yang dikenal sebagai *ajhâgâ* (martabat) dan *tengka* (tegas dan berintegritas) menjadi fondasi bagi legitimasi yang mereka miliki. Hasil wawancara dengan tokoh blater, kepala desa, dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa tokoh blater memiliki jangkauan sosial yang luas. Jangkauan ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara informal dan personal dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial seperti *sandur* (pertemuan komunitas) dan *to'otok* (ritual), di mana interaksi ini menguatkan hubungan mereka dengan elemen-elemen masyarakat.

### 1. Kontruksi Kuasa Simbolik Tokoh Blater di Bangkalan

Konstruksi kuasa simbolik tokoh blater di Bangkalan dapat dipahami melalui proses akumulasi modal sosial, budaya, dan ekonomi yang mereka miliki. Dalam konteks ini, tokoh blater tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin informal, tetapi juga sebagai representasi dari nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat Madura. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tokoh blater sering kali mengorbankan waktu dan sumber daya pribadi mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Dengan demikian, mereka membangun reputasi positif yang semakin memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat. Prinsip moral dan kehormatan, yaitu *ajhâgâ* dan *tengka*, menjadi fondasi yang menyokong kuasa simbolik mereka.

Tokoh blater yang mampu menunjukkan martabat dan integritas, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik, berpotensi besar untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Lebih lanjut, kuasa simbolik ini diberikan bobot tambahan oleh kehadiran mereka dalam berbagai acara komunitas, seperti pengajian atau perayaan adat. Kehadiran tokoh blater dalam konteks-konteks sosial yang kaya makna ini tidak hanya menciptakan narasi yang mengaitkan mereka dengan nilai-nilai lokal yang penting, tetapi juga memperkuat pengaruh sosial mereka.

## 2. Modal Sosial, Budaya, dan Ekonomi Tokoh Blater

Modal sosial, budaya, dan ekonomi memiliki peran yang krusial dalam menentukan daya tawar tokoh blater dalam konteks politik lokal. Modal sosial yang dimiliki oleh tokoh blater, berupa jaringan hubungan yang kuat, memungkinkan mereka untuk mengakses berbagai sumber daya dan informasi. Hal ini menjadi sangat penting dalam membangun dukungan politik, di mana koneksi personal sering kali lebih berharga daripada dukungan institusi formal.

Modal budaya juga berperan signifikan. Tokoh blater sering kali memiliki pengalaman hidup dan pemahaman yang mendalam tentang adat dan nilai-nilai lokal, yang memungkinkan mereka untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat. Misalnya, saat menyampaikan pesan politik, mereka menggunakan simbol-simbol budaya yang sudah akrab bagi masyarakat, sehingga pesan tersebut lebih mudah dipahami dan diterima.

Modal ekonomi, meskipun tidak selalu menjadi fokus, juga berkontribusi pada penguatan kuasa simbolik. Tokoh blater yang memiliki latar belakang ekonomi yang kuat sering kali dapat memberikan dukungan material kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk bantuan atau sponsor untuk kegiatan komunitas. Ini memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin yang responsif dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kuasa simbolik tokoh blater dikonstruksi melalui akumulasi dan konversi tiga bentuk modal sebagaimana dikonseptualisasikan Bourdieu (1986): modal sosial (jaringan relasi), modal budaya (penguasaan nilai lokal), dan modal ekonomi (sumber daya material). Ketiga modal ini kemudian ditransformasi menjadi modal simbolik berupa kehormatan dan otoritas yang diakui masyarakat. Tabel 1 menunjukkan bagaimana ketiga tokoh blater utama dalam penelitian ini membangun dan mengonversi modal-modal tersebut menjadi legitimasi politik.

**Table 1 Modal Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Simbolik Para Tokoh Lokal**

Tokoh	Modal Sosial	Modal Budaya	Modal Ekonomi	Modal Simbolik
H. Abd Rahman	Jaringan lokal-DPRD (2014-2020)	Konsistensi 0 Rupiah	Kedermawanan sosial	Legitimasi jangka panjang
H. Ganda	Kepala desa aktif	Transparansi elektoral	Bantuan 25-50 dus	Kepercayaan tinggi

Tokoh	Modal Sosial	Modal Budaya	Modal Ekonomi	Modal Simbolik
H. Muhammad Rawi	IKAMA nasional-internasional	Integritas di Jakarta	Fasilitator pedagang	Pengakuan lintas wilayah

Sumber : Diolah dari hasil wawancara peneliti, 2025.

Pada tabel 1 menunjukkan pola yang konsisten: ketiga tokoh membangun modal simbolik bukan melalui akumulasi kekayaan atau jabatan formal semata, melainkan melalui konsistensi moral jangka panjang. H. Abd Rahman dengan penolakan politik uang selama 21 tahun (1999-2020), H. Ganda Putra Satria dengan transparansi dan penolakan intimidasi, serta H. Muhammad Rawi dengan integritas yang dipertahankan meskipun harus mengorbankan popularitas semuanya menunjukkan bahwa modal simbolik terkuat justru lahir dari penolakan praktik transaksional yang lazim dalam politik lokal. Temuan ini kontras dengan penelitian Baihaki (2023) yang menemukan dominasi biaya politik transaksional dalam Pilkades Madura, mengindikasikan bahwa dalam skala Pilkada kabupaten, legitimasi jangka panjang berbasis integritas menjadi lebih determinan dibanding transaksi material jangka pendek.

### 3. Strategi Komunikasi Politik Tokoh Blater

Komunikasi politik tokoh blater dalam Pilkada Bangkalan 2024 memiliki karakteristik berbeda dari komunikasi politik konvensional. Pertama, pesan politik bersifat implisit dan dialogis, bukan eksplisit seperti visi-misi kampanye. H. Ganda Putra Satria menegaskan, "Kalo untuk pemilihan pilkada saya itu cuman bercerita ke masyarakat kalo saya ikut dengan salah satu kandidat dan saya cuman bercerita tidak mengajak masyarakat." Mustofa menjelaskan efektivitas pesan sederhana: "Ajakan itu, ya, dia tang oreng (orang saya), tidak mengajak, cuma menyebutkan aja itu tang oreng. Cuma menyebutkan gitu aja." Ungkapan "tang oreng" efektif bukan karena kehebatan linguistik, tetapi karena modal simbolik yang telah terakumulasi selama puluhan tahun berbeda dengan temuan Jupriono et al. (2022) yang menunjukkan pemimpin formal menggunakan strategi linguistik kompleks untuk manipulasi citra.

Kedua, saluran komunikasi adalah ruang-ruang informal, bukan media massa atau kampanye formal. H. Abd Rahman menjelaskan, "Kalau kita sebagai kepala desa tidak paham dengan karakter orang-orang perkampungan, itu bisa jadi masalah. Jadi kalau ingin menyampaikan sesuatu ke masyarakat, ya lewat kedekatan itu, lewat pergaulan sehari-hari." Komunikasi berlangsung dalam pertunjukan sandur, perkumpulan to'otok, dan silaturahmi face-to-face arena di mana relasi kuasa ditampilkan secara simbolik dan legitimasi blater diperkuat (Sutarto, 2004; Wahyudi, 2012).

Ketiga, strategi mengedepankan transparansi dan penghormatan terhadap otonomi masyarakat. H. Ganda Putra Satria secara eksplisit menyatakan: "Malah saya transparan ke masyarakat, sedeh degghik nyoblos, hasil rekaptulasinya bisa e yobe bhik engkok (hasil rekapitulasi bisa diubah sama saya nanti). Daripada seperti itu,

sudah coblos ini saja semuanya." Pernyataan berani ini mengakui kemampuan memanipulasi hasil tetapi memilih tidak melakukannya membangun kepercayaan yang sangat kuat melalui transparency signaling (Bourdieu, 1991).

#### 4. Mekanisme Pengaruh dan Mobilisasi Dukungan

Pengaruh kuasa simbolik tokoh blater terhadap mobilisasi dukungan bekerja melalui mekanisme misrecognition di mana masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi oleh kekuasaan simbolik, atau bahkan merasa bahwa mereka yang secara aktif memberikan legitimasi (Bourdieu, 1977). H. Abd Rahman menjelaskan: "Kalau sudah tokoh blater sudah ngomong kita dukung si A, maka semua akan 1 suara." Efektivitas ini bukan hasil intimidasi, melainkan kepercayaan yang dibangun melalui konsistensi jangka panjang.

Relasi patron-klien yang terbentuk tidak bersifat eksploitatif seperti temuan Hidayaturrahman et al. (2023) tentang blater di Sumenep yang menggunakan intimidasi dan politik uang. Sebaliknya, tokoh blater di Bangkalan membangun relasi berbasis kepercayaan dan nilai-nilai budaya. H. Abd Rahman menegaskan pentingnya menjaga batas kewenangan: "Kalau sudah masuk ke ranah desa, itu ranahnya pak kepala desa. Bangunlah komunikasi yang bagus dengan klebun-nya. Saya tahu diri, karena saya tidak mempunyai wewenang masuk dalam ranah desa."

Komunikasi politik blater juga berfungsi sebagai pendidikan politik informal yang meningkatkan kesadaran demokratis. H. Ganda Putra Satria mengajarkan kesadaran kolektif dengan menolak freming agama dalam politik: "Ya kalau kemarin waktu pilkada di pihak yang saya dukung membicarakan agama lah... tapi zaman sekarang... agama itu penting bukan tidak penting, tapi jangan dicampuradukkan dengan politik." Pendekatan ini mendidik masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menjaga harmoni sosial.

Efektivitas komunikasi politik blater terbukti dari hasil elektoral: pasangan nomor urut 2 yang hanya didukung tiga partai non-parlemen berhasil meraih 39,8% suara, mendekati perolehan pasangan nomor urut 1 yang didukung koalisi 12 partai besar (60,2%). Perolehan ini tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui mobilisasi institusional partai, melainkan menunjukkan efektivitas komunikasi politik berbasis kuasa simbolik yang bekerja melalui jaringan patron-klien organik dan legitimasi moral yang konsisten berbeda dengan temuan Termuji (2024) yang menunjukkan PDIP Surabaya mengandalkan 9 strategi institusional untuk meraih suara.

Tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 71,3%, jauh melebihi rata-rata nasional, juga mengindikasikan bahwa komunikasi politik tokoh blater tidak hanya efektif dalam mobilisasi dukungan kandidat tertentu, tetapi juga dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan. Temuan ini menantang asumsi umum bahwa kemenangan elektoral selalu memerlukan dukungan partai besar dan kampanye terstruktur, serta menunjukkan

bahwa dalam masyarakat dengan budaya kehormatan yang kuat, legitimasi personal berbasis nilai lokal dapat menjadi sumber daya politik yang lebih efisien.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kuasa simbolik tokoh blater dalam Pilkada Bangkalan 2024 merupakan manifestasi kekuatan komunikasi politik non-institusional yang berakar pada nilai-nilai lokal, dibangun melalui akumulasi modal jangka panjang, dan digunakan melalui strategi yang menghormati otonomi masyarakat. Legitimasi simbolik berbasis integritas moral terbukti dapat menghasilkan mobilisasi politik signifikan tanpa bergantung pada mesin partai besar, menunjukkan bahwa dalam konteks budaya kehormatan seperti Madura, modal simbolik dapat menjadi sumber daya politik yang lebih efisien dan berkelanjutan dibanding struktur formal partai.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi: (1) Masyarakat perlu mengembangkan kesadaran kritis dengan tidak hanya mengandalkan figur tokoh tetapi juga mengevaluasi kapasitas kandidat; (2) Tokoh blater seharusnya menggunakan kuasa simbolik tidak hanya untuk kemenangan elektoral tetapi juga untuk pendidikan politik masyarakat; (3) Partai politik dan kandidat perlu memahami dan menghormati struktur kekuasaan informal yang tertanam dalam masyarakat; (4) Pemerintah daerah dan KPU perlu merancang regulasi yang realistis dengan memahami dinamika kekuasaan informal; (5) Peneliti perlu melakukan kajian komparatif dan longitudinal untuk memahami variasi dan transformasi mekanisme komunikasi politik berbasis kuasa simbolik di berbagai konteks budaya Indonesia.

## REFERENSI

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Azhar, I. N., & Surokim (Eds.). (2018). *Madura 2020: Membumikan Madura menuju globalisasi*. Inteligencia Media. ISBN: 978-602-5562-21-1.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Anchor Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, self, and society*. University of Chicago Press.
- Mennet, R. (2011). *Political communication: A critical introduction*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Nimmo, D. (2005). *Political communication: A critical introduction*. SAGE Publications.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, Ed. 27). Alfabeta.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241-258). Greenwood Press.
- Aspinall, E. (2013). Clientelism and electoral politics in Indonesia: A case study. *Asian Survey*, 53(4), 763-786.



- Fauzi, M. (2022). Strategi mobilisasi politik kultural dalam pemilu di Madura. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(3), 123-135.
- Hidayaturrahman, M., Muhammad, N. S., Tini, D. L. R., & Ubaid, A. H. (2023). Blater's power in local politics: Village head election in Madura. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 5(2), 163-170.
- Lind, A. (2016). Ritual communication in political processes: Emotions and participation. *Journal of Political Communication*, 33(4), 601-619.
- Prasetya, R. (2023). Relasi patron-klien dalam pemilihan umum di Madura: Studi kasus di Bangkalan. *Jurnal Analisis Sosial*, 11(2), 150-162.
- Wahyudi, F. (2012). Symbols of political communication in local culture. *Jurnal Politik*, 11(2), 78-89.
- Hidayat, M. N. (2024). Perilaku kiai dalam politik di Pamekasan Madura: Studi kasus Pilkada Pamekasan 2018 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).